

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Taneko, soleman B, 1986. *konsepsi system sosial dan system sosial Indonesia*. jakarta: fajar agung.
- Astrid. S. Sutanto, 1979. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- Siahaan, P, Marihot, 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008. *Bangunan Gedung di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarto, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta,
- Bohari, 1995. *Pengantar Hukum Retribusi, Edisi Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunadi, 1997. *Retribusi Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta; Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Marsyahrul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Herlina Rahman, 2005. *Pendapatan Asli Daerah*, Penerbit Kerani, Surabaya.
- Warsito, 2001. *Perimbangan Keuangan Daerah*, Penerbit Sinar Jaya, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo 1998., *Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES*. Jakarta.

Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Praturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu

Wawancara:

Reny Dwi Isyana selaku Analis Perizinan kantor dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Senin, 20 Februari 2017.

Santi fatmawati selaku Analis Tata Ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber DayaMmanusia Kabupaten Magelang. . Senin, 20 Februari 2017.

Alam Purnomo Aji selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. .
Senin, 20 Februari 2017